

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI PROVINSI BALI

NI PUTU AYU PURNAMA MARGARENI, I KETUT DJAYASTRA, I.G.W MURJANA YASA
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
email: purnama.margareni@yahoo.com

ABSTRAK

Provinsi Bali mempunyai struktur perekonomian yang sangat unik, namun masih ditemukan penduduk miskin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) perkembangan penduduk miskin di Provinsi Bali, 2) pengaruh pendidikan, inflasi, pertumbuhan penduduk, dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi, 3) pengaruh pendidikan, inflasi, pertumbuhan penduduk, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, 4) pengaruh tidak langsung pendidikan, inflasi, pertumbuhan penduduk, dan pengangguran terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Path Analysis*. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemiskinan di Provinsi Bali sangat dipengaruhi oleh kemajuan pembangunan di masing-masing wilayah kabupaten/kota, pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, tidak ada pengaruh mediasi melalui pertumbuhan ekonomi. Untuk mengurangi kemiskinan hendaknya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat seperti program-program padat karya melibatkan penduduk miskin.

Kata Kunci: Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan

ABSTRACT

Bali has a unique economic structure but there are still poor people. This research aimed to analyze: 1) the development of poor population in Bali, 2) the effect of education, inflation, population growth and unemployment on economic growth, 3) the effect of education, inflation, population growth, unemployment and economic growth on poverty, 4) the indirect effect of education, inflation, population growth and unemployment on poverty through population growth. The analyzed using *Path Analysis*. The result showed the poverty in Bali is highly influenced by development in each regency/city, education had a positive impact on economic growth, unemployment had a negative impact on economic growth, education had a negative impact on poverty, unemployment had a positive impact on poverty, economic growth had a negative impact on poverty, did not mediate the effect through economy growth. To reduce the poverty, we should create a beneficial economic growth which involves the poor people.

Keywords: Education, Unemployment, Economic Growth, Poverty

PENDAHULUAN

Pada tingkat nasional maupun regional, kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis, sehingga diperlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan untuk menanggulangnya. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Menurut Maipita (2014), tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan berkaitan dengan kepemilikan barang, sehingga masyarakat miskin dapat

diartikan mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk membuat mereka berada dalam kategori sejahtera. Masyarakat miskin juga dapat dikatakan mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, kekurangan pangan, atau memiliki kesehatan yang buruk.

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu target kebijakan pembangunan di setiap negara agar kesenjangan pendapatan menjadi semakin kecil. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena untuk menanggulangi kemiskinan tersebut masalah yang dihadapi tidak terbatas pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi juga melibatkan preferensi, nilai dan politik. Menurut Todaro (2010) di negara-negara

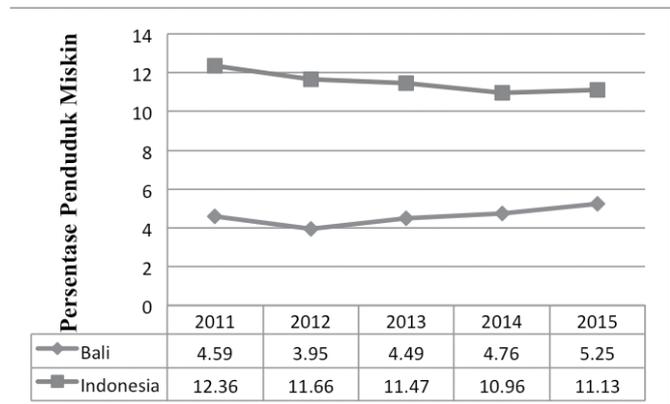
berkembang masih banyak ditemukan kemiskinan yang mencolok, meskipun telah terjadi perbaikan-perbaikan yang signifikan selama lebih dari separuh abad terakhir.

Masalah kemiskinan selalu memperoleh perhatian utama di Indonesia. Kegagalan dalam mengatasi masalah kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah telah berupaya serius untuk mengatasi kemiskinan sejak era Orde Baru. Hasilnya, di Indonesia selama periode 1976-1996 (Repelita II - V) tingkat kemiskinan berhasil diturunkan secara drastis dari 40 persen pada awal Repelita II menjadi hanya 11 persen pada awal Repelita V (Mubyarto, 2003). Periode 1976-1981 turun dari 54,2 juta jiwa yaitu 40,1 persen menjadi 40,6 juta jiwa yaitu 26,9 persen, pada tahun 1990 menurun menjadi 27,2 juta jiwa yaitu 15,1 persen, pada tahun 1996 jumlah penduduk miskin semakin menurun menjadi 22,5 juta jiwa atau 11,2 persen. Menurut Salmirawati (2008), pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang cukup besar selama ini terhadap upaya penanggulangan kemiskinan baik melalui pendekatan sektoral, regional, kelembagaan maupun kebijakan khusus yang dilaksanakan dengan berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah telah melaksanakan agenda pemulihan ekonomi sesudah krisis 1997 bersamaan dengan kebijakan otonomi daerah yang dititikberatkan pada kabupaten/kota. Pemerintah pusat maupun daerah telah berupaya melaksanakan berbagai kebijakan-kebijakan dan program-program dalam penanggulangan kemiskinan, namun masih jauh dalam pokok permasalahan. Masih adanya kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program tersebut lebih berorientasi pada program sektoral, sehingga diperlukan suatu strategi penanggulangan yang terpadu, terintegrasi dan sinergi agar dapat menyelesaikan masalah kemiskinan secara tuntas. Pada umumnya, pembangunan daerah tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga mempertimbangkan bagaimana kemiskinan yang dihasilkan dari suatu proses pembangunan daerah tersebut.

Berdasarkan Gambar 1 tentang persentase penduduk miskin di Provinsi Bali dan Indonesia pada tahun 2015 dapat dilihat bahwa masih terdapat kemiskinan di Provinsi Bali dan Indonesia. Persentase penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2011-2014 mengalami penurunan karena inflasi relatif rendah. Namun pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang diakibatkan oleh naiknya inflasi dari tahun 2014 sebesar 0,43 persen, tahun 2014 sebesar 0,26 persen dan tahun 2015 sebesar 2,69 persen. Selain itu, kenaikan persentase kemiskinan juga disebabkan oleh naiknya garis kemiskinan pada tahun 2014 yaitu Rp. 312.328 dan pada tahun 2015 menjadi Rp. 344.809.

Provinsi Bali masih memiliki penduduk miskin. Dilihat dari urutannya, Provinsi Bali menduduki urutan ke 30 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki perkembangan perekonomian yang pesat. Namun ditengah pesatnya perkembangan perekonomian tersebut masih ditemukan jumlah penduduk miskin. Padahal telah banyak dilaksanakan strategi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Bali untuk mengentaskan kemiskinan.



Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bali dan Indonesia Tahun 2011-2015
Sumber : BPS Indonesia (2016)

Provinsi Bali mempunyai struktur perekonomian yang sangat unik dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Keunikan ini disebabkan karena sebagian besar sumber penghidupan masyarakat bersumber dari sektor tersier (pariwisata) sedangkan sektor lainnya hanya berperan sebagai sektor pendukung (BPS, 2003). Sumber-sumber dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah menjadi penentu kemajuan pembangunan di masing-masing wilayah kabupaten/kota tersebut. Kabupaten/kota yang kaya sumber atau potensi ekonomi akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang lebih cepat dibandingkan kabupaten/kota yang tergolong dalam daerah miskin. Misalnya Kabupaten Badung yang memiliki potensi lebih besar dalam pengembangan kegiatan pariwisata, Kabupaten Gianyar yang memiliki potensi dalam kegiatan industri kecil, dan Kabupaten Tabanan dalam sektor pertanian. Sementara itu, Kabupaten Karangasem atau Kabupaten Bangli memiliki sumber atau potensi ekonomi yang relatif terbatas sehingga dapat menghambat laju pertumbuhan ekonominya. Walaupun Provinsi Bali telah ditunjang pendapatannya oleh beberapa kabupaten yang memiliki berbagai macam potensi, namun Provinsi Bali masih memiliki permasalahan yang sama dan relatif klasik yaitu kemiskinan. Di balik semua itu ternyata Provinsi Bali masih menyisakan rumah tangga miskin di daerahnya.

Beberapa strategi rancangan pembangunan Provinsi Bali disusun dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No.

1 Tahun 2014. Dalam peraturan tersebut dijelaskan tentang pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) di Provinsi Bali untuk tahun 2013-2018 adalah mengendalikan tingginya pertumbuhan penduduk, mempercepat perbaikan sistem dan akses pendidikan, meningkatkan kesehatan masyarakat, menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Berdasarkan RPJMD tersebut, kemiskinan masih tetap menjadi perhatian pemerintah Provinsi Bali.

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali Tahun 2010-2014

Kab./Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)					Persentase Penduduk Miskin				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Jembrana	21.3	17.6	15.3	14.9	15.8	8,11	6,56	5,74	5,56	5,83
Tabanan	29.3	24.2	21.0	22.5	24.4	6,96	5,62	4,90	5,21	5,61
Badung	17.7	14.6	12.5	14.5	15.4	3,23	2,62	2,16	2,46	2,54
Gianyar	31.5	26.0	22.6	20.8	22.5	6,68	5,40	4,69	4,27	4,57
Klungkung	12.9	10.7	9.3	12.2	12.3	7,58	6,10	5,37	7,01	7,01
Bangli	13.8	11.4	9.9	12.0	13.0	6,41	5,16	4,52	5,45	5,86
Karangasem	31.6	26.1	22.7	27.8	29.7	7,95	6,43	5,63	6,88	7,30
Buleleng	45.9	37.9	33.0	40.3	43.7	7,35	5,93	5,19	6,31	6,79
Denpasar	17.5	14.5	12.7	17.6	19.2	2,21	1,79	1,52	2,07	2,21
BALI	221.6	183.1	158.9	182.8	195.9	5,67	4,59	3,95	4,49	4,76

Sumber : BPS Provinsi Bali (2015)

Sejak tahun 2012 pemerintah Provinsi Bali mengembangkan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara atau disebut dengan Gerbang Sadu Mandara (GSM). Program itu menjadi wadah bagi masyarakat pedesaan untuk membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. GSM merupakan program atau kegiatan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran serta untuk mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Bali. Selain program tersebut, pemerintah Provinsi Bali masih memiliki beberapa upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan antara lain, bedah rumah, gapoktan, simantri, subak dan bantuan desa pekraman.

Pada Tabel 1 ditunjukkan data tingkat kemiskinan menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali belum sepenuhnya berhasil dalam menanggulangi kemiskinan. Ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang masih mengalami fluktuasi dari tahun 2010 sampai 2014. Rata-rata perkembangan penduduk miskin di Provinsi Bali tahun 2010-2014 adalah sebesar 4,69 persen. Perkembangan penduduk miskin semakin tahun terlihat semakin menurun, namun pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin menjadi meningkat. Perkembangan penduduk miskin pada tahun ini mencapai 182,8 ribu jiwa. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga BBM dan kenaikan garis kemiskinan tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 272.349 dari Rp. 249.997 pada tahun 2012, sehingga banyak masyarakat yang hidup di bawah

garis kemiskinan. Selain dari krisis dari kenaikan BBM dan garis kemiskinan juga harus dicari tahu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan. Dengan mencari tahu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan, maka diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan di Provinsi Bali.

Kemiskinan yang terjadi dalam rumah tangga disebabkan oleh rendahnya pendidikan. Faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Permasalahan mengenai investasi di dunia pendidikan dan kemiskinan hampir serupa. Umumnya menghadapi dilema apakah pertumbuhan ekonomi yang lebih didahulukan atautah investasi pendidikan yang lebih baik. Hubungan antara pendidikan dan kemiskinan cukup penting karena pendidikan memiliki peranan utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan (Haughton, 2012).

Di berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang hubungan antara pendidikan dan kemiskinan sudah sejak lama menjadi isu sentral. Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat, permasalahan muncul sebagai akibat dari besarnya subsidi yang diberikan kepada kelompok masyarakat miskin. Sementara di Indonesia permasalahannya terdapat pada ketidakadilan dalam memperoleh akses pendidikan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat kaya dan masyarakat miskin untuk bersekolah relatif sama tanpa melihat latar belakang ekonomi keluarganya.

Dalam membentuk pribadi manusia, faktor yang utama adalah pendidikan. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk pribadi manusia menurut ukuran normatif dilihat dari baik atau buruknya. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah lebih serius dalam menangani bidang pendidikan, karena dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan yang memadai, maka diharapkan penduduk miskin mendapatkan yang lebih baik agar masyarakat tersebut keluar dari status miskin di masa depan. Menurut Harlik dkk (2013), pendidikan merupakan suatu syarat untuk mencapai pembangunan ekonomi. Semakin tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang, maka produktifitas meningkat dan penghasilan atau upah juga akan meningkat. Meningkatnya upah atau pendapatan akan membantu masyarakat keluar dari jerat kemiskinan. Jadi antara tingkat pendidikan dan kemiskinan mempunyai hubungan yang negatif.

Selain pendidikan, kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian dimana tingkat harga dan biaya-biaya umum naik secara terus-menerus. Tingkat inflasi naik turun dari tahun ke tahun dan setiap negara mempunyai tingkat inflasi yang berbeda. Masalah inflasi merupakan

masalah yang selalu mendapat perhatian dari pemerintah. Tujuan jangka panjang pemerintah yaitu tetap menjaga agar tingkat inflasi selalu berada pada tingkat yang sangat rendah (Sukirno, 2006). Teori inflasi selalu dihubungkan dengan jumlah uang yang beredar. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan masyarakat yang mempunyai pendapatan tetap akan tergerus daya belinya, sehingga bagi masyarakat miskin akan menjadi sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Barika, 2013).

Pada tingkat dunia, inflasi merupakan tolak ukur perekonomian suatu negara apakah perekonomian suatu negara tersebut dalam keadaan baik atau buruk. Inflasi di Indonesia bukan merupakan suatu fenomena jangka pendek saja dan terjadi berdasarkan kondisi-kondisi tertentu, tetapi seperti halnya yang umum terjadi di negara-negara yang sedang berkembang lainnya, masalah inflasi di Indonesia lebih pada masalah inflasi jangka panjang. Bila inflasi dikaitkan dengan kemiskinan, apabila laju inflasi meningkat, maka akan diikuti oleh peningkatan pada batas garis kemiskinan (Imelia, 2012). Sebagai akibat dari peningkatan laju inflasi akan dapat mendorong terjadinya peningkatan pada jumlah penduduk miskin. Daya beli masyarakat berpendapatan rendah akan semakin merosot. Makin tinggi tingkat inflasi, makin banyak pula jumlah penduduk miskin. Jadi dengan demikian hubungan antara inflasi dan kemiskinan bersifat positif.

Hal lain yang terkait dengan kemiskinan adalah pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk yang meningkat apabila diikuti dengan kualitas SDM yang memadai merupakan modal pembangunan yang handal, namun apabila kualitas SDM rendah justru akan menjadi beban pembangunan (Astuti, 2015). Pertumbuhan penduduk yang cepat memberikan dampak negatif terhadap penduduk miskin terutama yang paling miskin. Ada beberapa hal yang menjadikan penduduk berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Jumlah penduduk yang besar menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga akan merangsang output atau produksi agregat yang lebih tinggi lagi. Kesejahteraan masyarakat akan meningkat, yang berarti tingkat kemiskinan akan turun (Todaro, 2006).

Kemiskinan juga dapat diakibatkan oleh tingginya tingkat pengangguran. Menurut Sukirno (2008), efek buruk dari pengangguran adalah akan mengurangi pendapatan masyarakat yang kemudian akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Dengan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat karena menganggur maka akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan. Akibat pengangguran

di suatu negara sangat buruk, karena dapat memicu terjadinya kekacauan politik dan sosial yang dapat menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan rencana pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Masalah pengangguran terjadi karena tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat namun pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat. Besarnya tingkat pengangguran mencerminkan bahwa kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara (Tambunan, 2001). Namun upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan merupakan hal yang penting. Jika masyarakat tidak menganggur berarti masyarakat tersebut mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan. Dengan penghasilan yang dimiliki maka diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika kebutuhan hidup terpenuhi maka tidak akan ada masyarakat miskin. Tingkat pengangguran yang rendah dengan kesempatan kerja yang ada tinggi, maka tingkat kemiskinan akan menjadi rendah.

Faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu pertumbuhan ekonomi. Para ahli ekonomi percaya bahwa cara yang terbaik untuk memperbaiki keterbelakangan ekonomi adalah dengan cara meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Di suatu negara syarat utama untuk menurunkan kemiskinan adalah dengan pertumbuhan ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi saja belum cukup untuk mengentaskan kemiskinan, karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan. Walaupun pertumbuhan ekonomi suatu negara bagus, tidak akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin bila tidak diimbangi dengan pemerataan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat untuk mengurangi kemiskinan (Harlik, 2013). Dengan pertumbuhan ekonomi yang efektif akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Menurut Barika (2013) bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan hasil pertumbuhan dari sektor usaha sangat diperlukan dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang negatif akan menyebabkan meningkatnya kemiskinan (Ishengoma dan Robert, 2006). Karena pertumbuhan ekonomi merupakan penggerak utama dalam menurunkan atau meningkatkan kemiskinan (Fosu, 2010). Menurut Azkenazy (dalam Sulistiawati, 2012) dampak dari pertumbuhan ekonomi yang positif diakibatkan oleh upah minimum.

Kemiskinan adalah salah satu faktor dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Sehubungan dengan hal itu, maka perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan itu. Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, inflasi, pertumbuhan penduduk, pengangguran, dan

pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : 1) Bagaimana perkembangan penduduk miskin di Provinsi Bali? 2) Bagaimana pengaruh pendidikan, inflasi, pertumbuhan penduduk, dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali? 3) Bagaimana pengaruh pendidikan, inflasi, pertumbuhan penduduk, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Bali? 4) Adakah pengaruh tidak langsung pendidikan, inflasi, pertumbuhan penduduk, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Bali melalui pertumbuhan ekonomi?

Penelitian ini memiliki tujuan untuk : 1) Menganalisis perkembangan penduduk miskin di Provinsi Bali, 2) Menganalisis pengaruh pendidikan, inflasi, pertumbuhan penduduk, dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali, 3) Menganalisis pengaruh pendidikan, inflasi, pertumbuhan penduduk, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Bali, 4) Menganalisis pengaruh tidak langsung pendidikan, inflasi, pertumbuhan penduduk, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Bali melalui pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini dilakukan karena Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki perkembangan perekonomian yang pesat ditunjang sebagian besar dari sektor pariwisata. Namun ditengah pesatnya perkembangan perekonomian tersebut masih ditemukan jumlah penduduk miskin. Dilihat dari urutannya, Provinsi Bali menduduki urutan ke 30 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

Objek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah faktor penyebab kemiskinan yang dilihat dari pendidikan, inflasi, pertumbuhan penduduk, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.

Sumber Data

Data sekunder adalah data kabupaten/kota di Provinsi Bali yaitu tentang pendidikan, inflasi, pertumbuhan penduduk, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti dengan cara wawancara secara langsung kepada pihak terkait untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Seluruh data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam. Metode observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung dokumen yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Wawancara mendalam adalah proses tanya jawab yang dalam penelitian berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara bertatap muka. Pada penelitian ini dilakukan wawancara langsung dengan pihak instansi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.

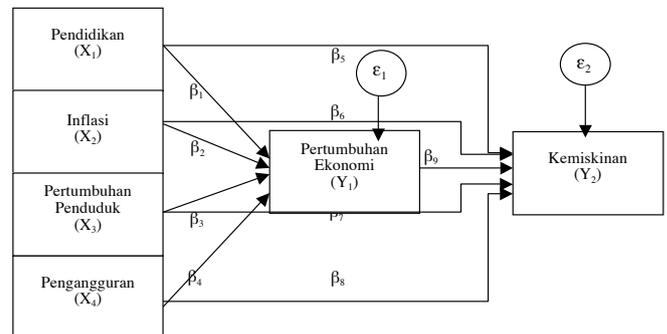
Teknik Analisis Data

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini yaitu dengan menerapkan statistik deskriptif untuk menghitung rata-rata, tabel-tabel, gambar-gambar dan sebagainya yang dibuat atau dihitung dengan program aplikasi SPSS maupun *Microsoft Excel*.

Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis jalur (*Path Analysis*) dan pengolahan data menggunakan program aplikasi SPSS ver.16.0



Gambar 2 Diagram Jalur

Pengujian Variabel Intervening

Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982) dan dikenal dengan nama Uji Sobel (Sobel Test). Uji Sobel ini dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel Independent terhadap variabel Dependent melalui variabel Mediasi (Utama, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Bali

Pemerintah Provinsi Bali menetapkan mengurangi jumlah penduduk miskin sebagai prioritas utama dalam RPJMD tahun 2008-2013 yang ditargetkan menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi 174.510 orang atau

setara 4,38 persen dari jumlah total penduduk di Bali. Maka setiap tahunnya angka kemiskinan ditargetkan menurun 10 ribu Rumah Tangga Miskin (RTM). Untuk mengukur kemiskinan penduduk, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Metode yang digunakan adalah dengan menghitung Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2005-2014

Periode	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2005	105.9	122.5	228.4	5.40	8.51	6.72
2006	127.4	116.0	243.5	6.40	8.03	7.08
2007	119.8	109.3	229.1	6.01	7.47	6.63
2008	115.1	100.6	215.7	5.70	6.81	6.17
2009	92.1	89.7	181.7	4.50	5.98	5.13
2010	83.6	91.3	174.9	4.04	6.02	4.88
2011	92.7	73.1	165.8	3.91	4.65	4.20
2012	90.4	76.5	166.9	3.77	4.79	4.18
2013	94.8	65.1	159.9	3.90	4.04	3.95
2014	99.9	85.3	185.2	4.01	5.34	4.53

Sumber : BPS Provinsi Bali 2015

Menurut BPS Provinsi Bali (2015) jumlah penduduk miskin pada periode 2005-2008 masih berada diatas kisaran 200 ribu orang tiap tahunnya. Semenjak 2009, jumlah penduduk di Provinsi Bali berada dibawah kisaran 200 ribu yaitu 181.7 ribu orang. Penurunan kemiskinan pada periode 2005-2014 sangat drastis. Namun terdapat sedikit peningkatan penduduk miskin yaitu pada tahun 2006, 2012 dan 2014.

Jika dilihat dari persentasenya, penduduk miskin meningkat pada tahun 2006 menjadi 7,08 persen dari tahun 2005 yaitu 6,72 persen, hal ini disebabkan oleh kenaikan harga BBM sebanyak dua kali yang dilakukan oleh pemerintah. Dari periode 2006-2013 persentase kemiskinan menunjukkan tren yang menurun cukup signifikan. Tahun 2014 persentase kemiskinan meningkat lagi, ini disebabkan oleh inflasi yang cukup tinggi diangka 8,03 persen dan lebih tinggi dari angka inflasi nasional yang berada diangka 7,32 persen. Selain itu juga disebabkan oleh kenaikan harga BBM, bensin premium naik menjadi Rp. 8.500 per liter dari semula Rp. 6.500 per liter, dan minyak solar naik menjadi Rp. 7.500 per liter dari semula Rp. 5.500 per liter.

Analisis Deskriptif

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pendidikan (X_1), Inflasi (X_2), Petumbuhan Penduduk (X_3), Pengangguran (X_4), Pertumbuhan Ekonomi (Y_1), dan Kemiskinan (Y_2), deskripsi data dari masing-masing variabel disajikan pada Tabel 3. Tabel 3 mendeskripsikan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai

maksimum dan minimum masing-masing sebesar 7,30 dan 4,02 dengan rata-rata 5,7742 dan standar deviasi 0,70830. Variabel Kemiskinan memiliki nilai maksimum dan minimum masing-masing sebesar 10,49 dan 1,52 dengan rata-rata 5,8911 dan standar deviasi 2,18091

Tabel 3. Deskripsi Data Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
		Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Pendidikan	90	5.00	11.05	7.7346	.15109	1.43337
Inflasi	90	3.75	11.31	6.7450	.25613	2.42984
Pertumbuhan Penduduk	90	-.91	7.00	1.3862	.13352	1.26671
Pengangguran	90	.48	6.80	3.0094	.14993	1.42237
Pertumbuhan Ekonomi	90	4.02	7.30	5.7742	.07466	.70830
Kemiskinan	90	1.52	10.49	5.8911	.22989	2.18091
Valid N (listwise)	90					

Sumber : Lampiran 2

Pengaruh Langsung

Untuk mengetahui pengaruh langsung antarvariabel dapat dilihat dari hasil olah data SPSS yang berbentuk ringkasan koefisien jalur seperti yang disajikan pada Tabel 4 dan diagram jalur seperti Gambar 3

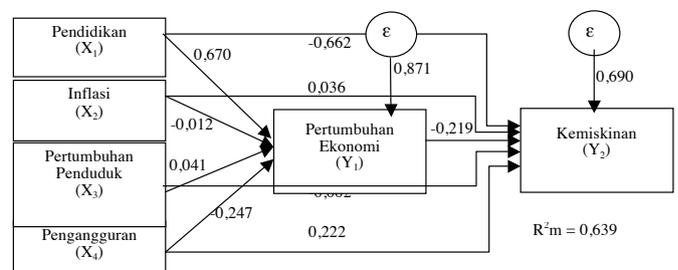
Tabel 4. Ringkasan Koefisien Jalur

Hubungan	Koefisien Regresi standar	Standard Error	t hitung	P. value	Keterangan
$X_1 \rightarrow Y_1$	0.670	0.040	8.278	0.000	Positif Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_1$	-0.012	0.023	-0.159	0.874	Negatif Nonsignifikan
$X_3 \rightarrow Y_1$	0.041	0.048	0.481	0.632	Positif Nonsignifikan
$X_4 \rightarrow Y_1$	-0.247	0.042	-2.945	0.004	Negatif Signifikan
$X_1 \rightarrow Y_2$	-0.662	0.122	-8.226	0.000	Negatif Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_2$	0.036	0.052	0.616	0.540	Positif Nonsignifikan
$X_3 \rightarrow Y_2$	-0.002	0.110	-0.032	0.975	Negatif Nonsignifikan
$X_4 \rightarrow Y_1$	0.222	0.100	3.404	0.001	Positif Signifikan
$Y_1 \rightarrow Y_2$	-0.219	0.247	-2.727	0.008	Negatif Signifikan

Sumber: Lampiran 3 dan Lampiran 4 (Diolah)

Keterangan :

- Y2 : Kemiskinan
- Y1 : Pertumbuhan Ekonomi
- X1 : Pendidikan
- X2 : Inflasi
- X3 : Pertumbuhan Penduduk
- X4 : Pengangguran



Gambar 3. Diagram Jalur Penelitian

Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Pendidikan merupakan salah satu modal dasar manusia yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Todaro, 2006). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Lubis (2014) dan Sunusi (2014) yakni indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah pendidikan. Manfaat dari pembangunan dalam pendidikan adalah kehidupan manusia akan semakin berkualitas.

Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Peningkatan pada harga produksi karena inflasi yang tinggi akan menyebabkan masyarakat mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga pertumbuhan ekonomi akan menurun. Hal ini sejalan dengan pernyataan Nanga (2005) yang menyatakan bahwa inflasi yang tinggi akan mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Penelitian dilakukan oleh Supartoyo (2013) dan Chatami (2014) menyebutkan bahwa pengaruh tidak signifikannya inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain disebabkan karena inflasi (demand full) pada rate yang wajar menunjukkan tanda peningkatan pendapatan sehingga tidak sampai menggerus pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Suatu negara akan mampu memproduksi lebih banyak barang dan jasa apabila jumlah penduduknya tinggi, yang berarti juga masyarakat akan dapat mengkonsumsi lebih banyak barang dan jasa. Hal ini selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damhudin (2009) dan Arianto (2015) yang menyatakan pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang besar dan memiliki kualitas SDM yang tinggi akan lebih produktif sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Penelitian dari Supartoyo (2013) dan Rini (2016) menyatakan pertumbuhan penduduk tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena rendahnya kualitas modal manusia angkatan kerja yang melakukan aktifitas ekonomi. Pada daerah berkembang biasanya memiliki modal yang kurang, teknologi masih sederhana, tenaga kerja kurang ahli, oleh karena itu pertumbuhan penduduk benar-benar dianggap sebagai hambatan pembangunan ekonomi.

Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengangguran juga dapat menimbulkan masalah sosial seperti tindakan kriminalitas dan masalah ekonomi. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat akan menurun. Semakin rendah angka pengangguran maka akan semakin makmur kehidupan masyarakat, begitu pula sebaliknya. Penelitian ini

sejalan dilakukan oleh Utami (2011), Pramesthi (2013) dan Paramita (2015) menjelaskan bahwa jika pengangguran meningkat dapat membuat pertumbuhan ekonomi menurun karena daya beli masyarakat turun, sehingga mengakibatkan kelesuan bagi pengusaha untuk melakukan investasi.

Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Tercapainya tujuan pembangunan bidang pendidikan pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas penduduk, dimana pertumbuhan produktivitas penduduk tersebut merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk tersebut. Hal ini dijelaskan dalam penelitian Darussamin (2016) bahwa jika pendidikan di suatu daerah sudah baik berarti mutu SDM di daerah tersebut juga baik. Walaupun terjadi peningkatan rata-rata lama pendidikan di Provinsi Bali namun masih terdapat siswa yang putus sekolah (drop out). Ada 624 siswa (0,38 persen) yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA/SMK pada tahun ajaran 2014/2015. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya akses transportasi, cara pandang yang kurang positif terhadap arti pendidikan bagi kehidupan kedepan dan kesulitan ekonomi yang membuat siswa berhenti sekolah karena mencari pekerjaan.

Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini diperkuat dengan penelitian Manik (2013) dan Septajaya (2014) yaitu inflasi yang tinggi dapat menyebabkan masyarakat berpendapatan tetap akan tergerus daya belinya, sehingga bagi masyarakat miskin akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Inflasi tidak signifikan terjadi apabila inflasi masih di taraf wajar, justru inilah yang dibutuhkan oleh para produsen untuk mengembangkan produksinya. Dengan pengembangan produksi maka semakin banyak menyerap tenaga kerja dan masyarakat miskin akan semakin berkurang. Laju inflasi di Provinsi Bali berada pada tingkat yang rendah, yaitu dibawah 10 persen, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap kemiskinan. Pemerintah Provinsi Bali telah berhasil dalam mengendalikan inflasi yang rendah dengan berfokus pada pengendalian pasokan bahan pangan dibantu dengan peran Bulog dan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) masing-masing kabupaten/kota. Pemerintah dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan dari kenaikan harga BBM, gas dan listrik.

Pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Walaupun jumlah penduduk meningkat tetapi masih ada beberapa faktor yang tidak menyebabkan penurunan terhadap kemiskinan, seperti bantuan pendidikan dari pemerintah yang membuat SDM meningkat dan meningkatkan kesejahteraan (Hendrati, 2009). Selain itu, para migrasi yang masuk ke Provinsi Bali memiliki SDM yang tinggi atau memiliki keterampilan sehingga tidak menyebabkan

terjadinya kemiskinan. Siregar dan Wahyuniarti (2008) menjelaskan apabila jumlah penduduk semakin banyak maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Penelitian yang menunjukkan pengaruh tidak signifikan yaitu Lukitasari (2015) menjelaskan apabila jumlah penduduk meningkat dan tidak dibekali oleh SDM yang memadai dan tidak diimbangi oleh sarana dan prasarana yang memadai maka akan menyebabkan peningkatan pada kemiskinan. Laju pertumbuhan penduduk disebabkan oleh fertilitas, mortalitas dan migrasi. Pelaksanaan program KB di Provinsi Bali telah berhasil dalam penurunan tingkat kelahiran. Migrasi masuk menuju Provinsi Bali cenderung lebih besar dari migrasi keluar. Hal ini karena peran sektor pariwisata menjadi prioritas pembangunan daerah di Provinsi Bali. Jumlah penduduk yang tinggi di Provinsi Bali baik dari kelahiran maupun migrasi tidak ditunjang dengan SDM yang berkualitas sehingga hal tersebut menyebabkan kemiskinan.

Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil ini diperkuat oleh penelitian Astrini (2013), Sumaryono (2013), dan Parwata (2016). Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Seseorang yang pengangguran dan tidak berpenghasilan tidak akan jatuh miskin jika didalam rumah tangga tersebut ada yang memiliki penghasilan yang tinggi. Sehingga secara rata-rata pengeluaran perkapita rumah tangga tersebut tetap berada diatas garis kemiskinan. Hal ini berbanding lurus dengan teori Sukirno (2004), apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk maka kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran di Provinsi Bali tidak hanya berasal dari penduduk lokal tetapi juga bertambah seiring dengan semakin besarnya arus migrasi. Pertambahan penduduk tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan kesempatan kerja sehingga menyebabkan kemiskinan. Hal lain juga disebabkan dari arus migrasi yang tidak diimbangi dengan SDM yang memadai bagi para pencari kerja.

Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Ketika perekonomian berkembang di suatu kawasan (negara atau kawasan tertentu yang lebih kecil), terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan, yang jika terdistribusi dengan baik diantara penduduk kawasan tersebut akan mengurangi kemiskinan. Penelitian lain yang menjelaskan hal yang sama yaitu Jonaidi (2012) dan Kuncoro (2014). Dengan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi berarti terjadi kenaikan pendapatan perkapita daerah yang mengakibatkan angka kemiskinan turun. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali ditopang oleh 3

pilar yaitu pilar pariwisata, pilar perdagangan ekspor dan impor, dan pilar penguatan pertanian. Pada setiap pilar tersebut telah dilakukan berbagai macam upaya seperti 13 program unggulan yang terangkum dalam Program Pembangunan Bali Mandara. Diharapkan dengan adanya 3 pilar tersebut pertumbuhan ekonomi di tiap kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas memiliki manfaat seperti adanya lowongan kerja sehingga mengurangi pengangguran, memperbaiki ekonomi, meningkatkan kestabilan sosial politik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Tidak Langsung

Hasil pengujian antara Variabel Pendidikan (X_1), Inflasi (X_2), Pertumbuhan Penduduk (X_3), Pengangguran (X_4) terhadap Kemiskinan (Y_2) melalui Pertumbuhan Ekonomi (Y_1) di Provinsi Bali, disajikan pada Tabel 4. Kriteria yang digunakan dalam analisis ini adalah z hitung $> z$ tabel, maka H_0 ditolak. Tidak terdapat peran mediasi Pertumbuhan Ekonomi dalam hubungan Pendidikan, Inflasi, Pertumbuhan Penduduk, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali dengan z hitung $-5,286 < 1,96$.

Tabel 4. Hasil Uji Variabel Intervening

Variabel Exogen	Variabel Mediasi	Variabel Endogen	ab	Sab	Z	Ket.
Pendidikan	Pertumbuhan Ekonomi	Kemiskinan	-0.333	0.063	-5.286	Non signifikan
Inflasi	Pertumbuhan Ekonomi	Kemiskinan	-0.000	0.000	0.000	Non signifikan
Pertumbuhan Penduduk	Pertumbuhan Ekonomi	Kemiskinan	-0.000	0.000	0.000	Non signifikan
Pengangguran	Pertumbuhan Ekonomi	Kemiskinan	-0.042	0.000	0.000	Non signifikan

Sumber: Lampiran 6

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kemiskinan di Provinsi Bali setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Jumlah penduduk miskin pada periode 2005-2008 masih berada diatas kisaran 200 ribu orang tiap tahunnya. Semenjak 2009, jumlah penduduk di Provinsi Bali berada dibawah kisaran 200 ribu yaitu 181.7 ribu orang. Pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan. Pertumbuhan penduduk

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan. Pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tidak memediasi pengaruh pendidikan, inflasi, pertumbuhan penduduk, dan pengangguran terhadap kemiskinan.

Saran

Pemerintah Provinsi Bali diharapkan dapat memberikan fasilitas pendidikan gratis dan beasiswa bagi para anak yatim dan kalangan tidak mampu, sehingga pendidikan dapat merata dan tercipta SDM yang berkualitas sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. Menekan laju inflasi, khususnya yang bersumber dari kelompok harga makanan. Mengimbangi peningkatan jumlah tenaga kerja dengan kesempatan kerja yang lebih banyak. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat seperti program-program padat karya melibatkan penduduk miskin, sehingga mereka dapat bekerja dan memperoleh penghasilan. BKKBN Provinsi Bali juga diharapkan lebih memperhatikan laju pertumbuhan penduduk di desa, karena angka kelahiran di desa lebih besar daripada di kota, sehingga fokus utama program KB lebih baik dilakukan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Chistiawan Eka., Sonny Sumarsono dan M, Adenan. 2015. "Pengaruh Jumlah Penduduk dan Angka Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember" (*Artikel Ilmiah Mahasiswa*). Jember: UNEJ.
- Astuti, Restu Ratri. 2015. "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia tahun 2004-2012" (*Skripsi*). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Astrini A, Ni Made Myanti dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja. 2013. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali (*E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*). Vol 2 [8] : 384-392
- Barika. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera. *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*. Vol 5 [1] : 27-36
- BPS. 2003. *Pemantauan kemiskinan di Indonesia: Metode Pengukuran dan Perkembangannya*. P.35
- BPS Provinsi Bali 2015. *Bali Dalam Angka*. Provinsi Bali
- _____. 2016. *Bali Dalam Angka*. Provinsi Bali
- Chatami, Fatma Dayuning. 2014. "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Inflasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta tahun 1991-2012" (*Skripsi*). Surakarta: Universitas Muhammadiyah
- Damhuddin, Meiri dan Benardin. 2009. "Pengaruh Pertambahan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Begkulu" (*Tesis*). Bengkulu: UNIB.
- Darussamin. 2016. "Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan PDRB, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2013" (*Skripsi*). Palembang: UIN Raden Fatah
- Fosu, Augustin Kwasi. 2010. Growth, Inequality, and Poverty Reduction in Developing Countries: Recent Global Evidence. *CSAE Working Paper WPS, 07*
- Harlik, Amri Amir dan Hardiani. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. Vol 1 [2] : 109-120
- Houghton, Jonathon dan Shahidur R. Khandker. 2012. *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan (Handbook on Poverty and Inequality)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hendradi, Ignatia Martha dan Hera Aprilianti. 2009. Analisis Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan pada saat Krisis di Kota Surabaya (*Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*). Vol 9 [1].
- Imelia. 2012. Pengaruh Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*.
- Ishengoma, Esther K dan Robert Kappel. 2006. Economic Growth and Poverty: Does Formalisation on Informal Enterprises Matter. *GIGA Working Papers, GIGA-WP-20*.
- Jonaidi, Arius. 2012. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia (*Jurnal Kajian Ekonomi*). Vol 1 [1] : 140-164
- Kuncoro, Sri. 2014. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2011" (*Skripsi*) Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Lubis, Citra Ayu Basica Effendy. 2014. Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan Pekerja dan Pengeluaran Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (*Jurnal Economia*). Vol 10 [2] : 187-193.
- Lukitasari, Kintan. 2015. Pengaruh Jumlah Penduduk dan Dependency Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat. (*Jurnal*). Vol: 4 [3].
- Maipita, Indra. 2014. *Memahami dan Mengukur Kemiskinan, Cetakan I*. Yogyakarta: Penerbit Absolute Media.
- Manik, Tumpal. 2013. Analisis Pengaruh Kemakmuran, Ukuran Pemerintah Daerah, Inflasi, Intergovernmental Revenue, dan Kemiskinan terhadap Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi (*Jurnal Organisasi dan Manajemen*). Vol 9 [2] : 107-124
- Mubyarto. 2003. *Pengantar Ekonomi Pertanian Edisi Ketiga*. Jakarta: LP3ES.
- Nanga, Muana. 2005. *Makro Ekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Paramita, Anak Agung Istri Diah. 2015. Pengaruh Investasi dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kemiskinan di Provinsi Bali (*E-jurnal Ekonomi Pembangunan*). Vol 4 [10] : 1194-1218
- Parwata, I Made., I Wayan Swendra dan Fridayana Yudiaatmaja. 2016. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan (*E-Journal Bisma*). Vol 4
- Pramesthi, Rovia Nugrahani. 2013. *Pengaruh Pengangguran dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Trenggalek*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
- Rini, Apriani. 2016. "Analisis Dampak Pertumbuhan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia" (*Tesis*). Universitas Andala.
- Salmirawati, Rini. 2008. "Karakteristik Rumah Tangga Miskin menurut Tingkat Kemiskinan di Kota Padang Panjang" (*Tesis*). Universitas Andalas
- Septajaya, Feby. 2014. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di

- Provinsi Bengkulu” (Skripsi), Universitas Bengkulu.
- Siregar, H dan Wahyuniarti, D. 2008. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa
- _____. 2008. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa
- Sulistiawati, Rini. 2012. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia (*Jurnal Eksos*). Vol 3 [8] : 195-211
- Sumaryono. 2013. Data Kemiskinan Dalam Pembangunan Wilayah Ciayumajakuning (*Jurnal Ekonomi*). Vol 7 [3] : 79-106
- Sunusi, Dewi Kurniawati., Anderson Kumenaung dan Debby Rotinsulu. 2014. Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah pada Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Sulawesi Utara tahun 2001-2010 (*Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*). Vol 14 [2] : 120-137
- Supartoyo, Yesi Hendriani., Jen Tatum dan Recky H. E. Sendouw. 2013. The Economic Growth and The Regional Characteristics: The Case of Indonesia (*Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*)
- Tambunan, Tulus. 2001. *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesebelas*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2010. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Utama, Made Suyana. 2014. *Ekonometrika Terapan*. Denpasar: Tidak Diterbitkan
- Utami, Nunung Nurastuti. 2011. *Investasi Sumber Daya Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi (Disertasi)*. Malang: Universitas Negeri Malang